



Kampung Ramah Anak Bertambah

UMBULHARJO – Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota layak anak semakin terarah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak pada akhir 2015.

“Ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti setelah ditetapkannya peraturan daerah tersebut, seperti pengembangan kampung ramah anak, sekolah ramah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak,” kata Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta Lucy Irawati di Balaikota Timoho Yogyakarta, Kamis (14/1).

Saat ini, di Kota Yogyakarta sudah ada sebanyak 159 kampung ramah anak yang

berbasis rukun warga (RW) dan pada tahun ini akan ada penambahan 32 kampung. Pembentukan kampung ramah anak pada tahun ini akan berbeda dibanding tahun sebelumnya yaitu tidak lagi menggunakan dana hibah melainkan menggunakan belanja langsung melalui program dari KPMP.

“Kami pun berupaya untuk menetapkan sejumlah kampung ramah anak sebagai percontohan. Artinya, kampung tersebut benar-benar sudah mampu memenuhi berbagai hal yang dibutuhkan anak sehingga bisa dicontoh oleh kampung lainnya,” katanya.

KPMP Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk pembentukan kampung ramah anak

yang bisa dijadikan sebagai percontohan.

“Di Indonesia, baru Kota Yogyakarta saja yang memiliki kampung ramah anak. Di kota lain, hanya dilakukan sebatas pada tingkat kecamatan,” katanya.

Selain melakukan pembentukan kampung ramah anak baru, Lucy mengatakan, evaluasi mengenai kualitas kampung ramah anak yang sudah terbentuk juga tetap dilakukan. Sedangkan untuk sekolah ramah anak akan ditetapkan sekolah percontohan sesuai jenjang pendidikan yang akan mewakili wilayah Yogyakarta bagian timur, barat, utara dan selatan.

“Nantinya, akan ada setidaknya satu perwakilan sekolah di tiap jenjang pendidikan dari mulai taman kanak-kanak hingga

SMA/SMK yang menjadi sekolah ramah anak,” katanya.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) tersebut juga akan diikuti dengan penerbitan peraturan wali kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

“Akan ada empat peraturan wali kota yang diterbitkan,” katanya.

Ia berharap, penetapan peraturan daerah tersebut dapat mendorong Kota Yogyakarta untuk bisa memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang sebenarnya. Pada 2015, Kota Yogyakarta baru mampu memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Kategori tertinggi adalah kategori Nindya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005